

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

**Feri Tristiawan<sup>1\*</sup>, Shofiatul Mila<sup>2</sup>, Desi Ofta Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Selamat Sri, Kendal

email: [f3121t@gmail.com](mailto:f3121t@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Besarnya dana yang di terima oleh desa tentunya menjadikan permasalahan bagi desa itu sendiri maupun pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa. Pengelolaan Dana Desa hingga saat ini merupakan hal yang sangat diperhatikan agar lebih optimal dan dikelola dengan baik sehingga anggaran Dana Desa yang dikeluarkan tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari anggaran Dana tersebut misalnya pembangunan atau infrastruktur desa dan kerja keras pemerintah. Serta menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dan variabel independen dalam penelitian ini adalah transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat.

**Kata kunci:** *Transparansi, Kompetensi, SPI, Akuntabilitas Pemerintah, Dana Desa*

### **PENDAHULUAN**

Kedudukan desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Indonesia di tuangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif tetapi desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri atau desa sebagai daerah otonom. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah dapat melaksanakan kebijakannya sendiri sesuai dengan yang di amanahkan dalam undang-undang tersebut di atas. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan tingkat desa, maka dibutuhkan peraturan pelaksanaannya.

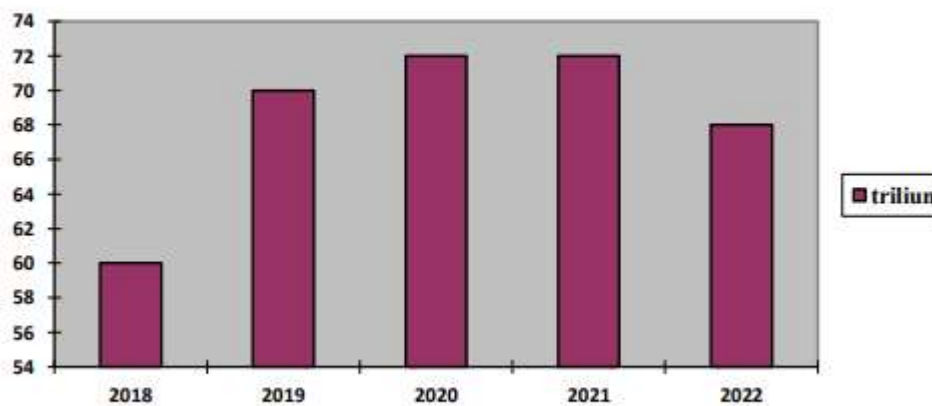
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 215 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikut sertakan pemerintah desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Undang-undang tersebut di atas menunjukkan bahwa fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan yang sangat penting.

Dalam mendorong percepatan pemerataan pembangunan sampai dengan ke desa maka kewenangan desa dalam mengelola anggaran semakin besar dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dengan penerapan undang- 3 undang tersebut desa

akan mendapatkan dana hampir 1 (satu) miliar rupiah untuk kegiatan pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan dan banyak kegiatan lain. Dana Desa juga terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dikarenakan pada tahun 2019 Indonesia mengalami pandemi covid-19 sehingga besaran alokasi anggaran dana desa di fokuskan kebanyakan untuk penanganan pandemi covid-19, diantaranya termasuk vaksinasi.

Pada tahun 2022 besaran alokasi anggaran dana desa mengalami penurunan dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, dikarenakan pandemi sudah cukup teratasi dan juga dana desa ini sudah tersalurkan mulai 2015 sampai 2021, logikanya dana desa ini mestinya sudah mampu untuk menurunkan angka kemiskinan di desa, maka alokasi anggarannya turun. Berikut perkembangan penyaluran dana desa dari tahun 2018 sampai tahun 2022.

Grafik 1.1  
Perkembangan Besaran Dana Desa  
Pada Tahun 2018-2022



Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022

Besarnya dana yang di terima oleh desa tentunya menjadikan permasalahan bagi desa itu sendiri maupun pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan terhadap dana desa. Pengelolaan Dana Desa hingga saat ini merupakan hal yang sangat diperhatikan agar lebih optimal dan dikelola dengan baik sehingga anggaran Dana Desa yang dikeluarkan tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat dari anggaran Dana tersebut misalnya pembangunan atau infrastruktur desa dan kerja keras pemerintah. Serta menciptakan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan di desa.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas- luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

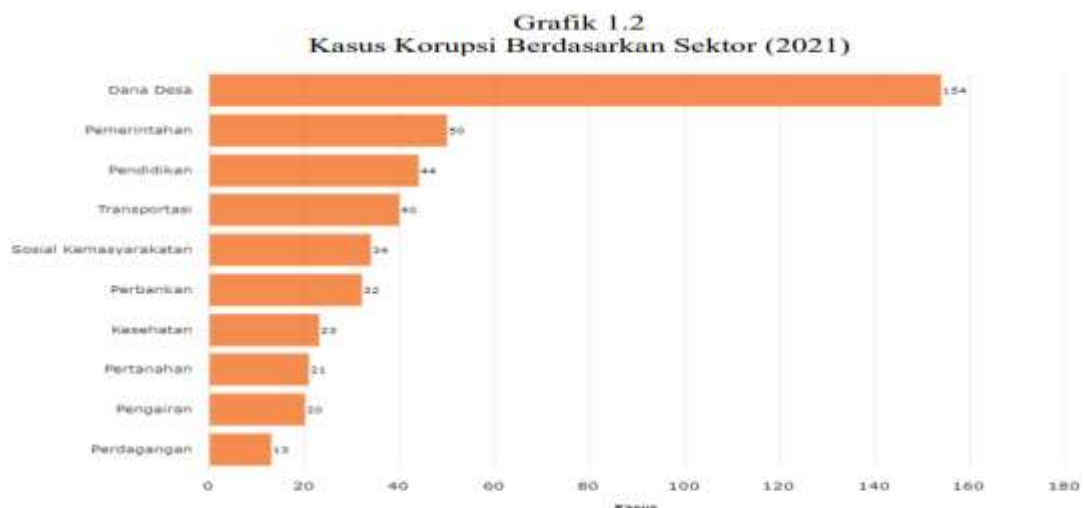
Kompetensi yang dimiliki aparat pemerintah turut mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Kurangnya kompetensi aparat desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau di laksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan.

Sistem pengendalian internal berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Sistem pengendalian internal yaitu proses setiap dimana tindakan atau usaha

yang dijalankan setiap saat oleh pemimpin atau seluruh pegawai akan memberikan keyakinan agar tercapainya tujuan kelompok melalui kegiatan yang tepat dan mudah, laporan keuangan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan partisipasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam membangun dan mengembangkan desa. Keterlibatan peran partisipasi masyarakat dapat berpengaruh dalam proses evaluasi dan pengendalian atas kegiatan pemerintah dan mengurangi terjadinya penyimpangan wewenang. Selain itu, keterlibatan partisipasi masyarakat bertujuan demi terwujudnya anggaran yang efektif, karena dapat memberikan saran dalam penyusunan tujuan dan kebijakan anggaran (Putra & Rasmini, 2019).

*Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung terus meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar. Kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW mengemukakan pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani APH terbanyak pada tahun 2021, sehingga ICW merekomendasikan, pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara lebih ketat.



Sumber : Data *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, 2021

Melihat data grafik kasus korupsi pada tahun 2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi Dana Desa seringkali terjadi. ICW juga menyatakan bahwa jumlah kasus korupsi Dana Desa selalu melonjak sehingga menunjukkan belum adanya sistem yang secara ekstensif dilakukan atau dibentuk untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal pengawasan Dana Desa.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan yang terdiri dari 8 Desa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : (1.) Perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kasi pelayanan, kasi perencanaan, kepala dusun dan badan permusyawaratan desa (2.)

Perangkat desa yang memiliki masa kinerja minimal 1 tahun (3.) Perangkat desa yang terlibat secara langsung dalam proses pencatatan transaksi keuangan desa dan bertugas untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintahan desa. (4.) Masyarakat sekitar dengan kriteria usia minimal 25 Tahun.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada uji statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data sampel antara lain mean, median, maksimum, minimum dan deviasi standar. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada uji validitas dan uji reliabilitas dan dengan uji asumsi klasik ada normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang terakhir adalah uji regresi linier berganda, uji parsial (uji t) dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran atau deskripsi data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif memberikan gambaran distribusi data yang meliputi mean, median, maksimum, minimum, serta standar deviasi dari masing - masing variabel yaitu Transparansi (X1), Kompetensi (X2), Sistem 61 Pengendalian internal (X3), Paartisipasi Masyarakat (X4) dan Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y). Mengenai hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X_1	150	11.00	25.00	20.3867	2.43516
X_2	150	15.00	25.00	20.3933	2.19486
X_3	150	16.00	25.00	21.0333	2.35283
X_4	150	16.00	25.00	20.6733	2.17211
Y	150	14.00	25.00	20.7667	2.38118
Valid N ( <i>listwise</i> )	150				

*Sumber: data primer yang diolah, 2023.*

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah : (1.) Variabel Transparansi (X1), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 11 sedangkan nilai maksimum sebesar 25, nilai rata – rata transparansi sebesar 20,3867 dan standard deviasi data transparansi adalah 2,43516 (2.) Variabel Kompetensi (X2), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 15 sedangkan nilai maksimum sebesar 25, nilai rata – rata transparansi sebesar 20,3933 dan standard deviasi data transparansi adalah 2,19486 (3.) Variabel Sistem Peendalian Internal (X3), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 16 62 sedangkan nilai maksimum sebesar 25, nilai rata – rata transparansi sebesar 21,0333 dan standard deviasi data transparansi adalah 2,35283 (4.) Variabel Partisipasi Masyarakat (X4), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 16 sedangkan nilai maksimum sebesar 25, nilai rata – rata transparansi sebesar 20,6733 dan standard deviasi data transparansi adalah 2,17211 (5.) Variabel Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 14 sedangkan nilai maksimum sebesar 25, nilai rata – rata transparansi sebesar 20,7667 dan standard deviasi data transparansi adalah 2,38118.

**Uji Kualitas Data**

## a. Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas dapat diketahui seluruh pernyataan kuesioner baik variabel independen maupun variabel dependen adalah valid, karena R hitung > R tabel (N=148) = 0,16 sehingga dapat dinyatakan seluruh butir pertanyaan variabel dalam penelitian ini layak dipakai sebagai instrument penelitian dan dinyatakan Valid. Hasil uji validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	R hitung	R tabel	Keterangan
X1.1	0,668	0,16	Valid
X1.2	0,686	0,16	Valid
X1.3	0,690	0,16	Valid
X1.4	0,752	0,16	Valid
X1.5	0,693	0,16	Valid
X2.1	0,700	0,16	Valid
X2.2	0,590	0,16	Valid
X2.3	0,611	0,16	Valid
X2.4	0,609	0,16	Valid
X2.5	0,621	0,16	Valid
X3.1	0,719	0,16	Valid
X3.2	0,673	0,16	Valid
X3.3	0,626	0,16	Valid
X3.4	0,659	0,16	Valid
X3.5	0,683	0,16	Valid
X4.1	0,673	0,16	Valid
X4.2	0,681	0,16	Valid
X4.3	0,694	0,16	Valid
X4.4	0,613	0,16	Valid
X4.5	0,608	0,16	Valid
Y1	0,611	0,16	Valid
Y2	0,676	0,16	Valid
Y3	0,701	0,16	Valid
Y4	0,715	0,16	Valid
Y5	0,716	0,16	Valid

*Sumber: data primer yang diolah, 2023.*

## b. Uji Reliabilitas

Berdasarkan pengujian reliabilitas diatas variabel Transparansi (X1) memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,730, cronbach alpha kompetensi (X2) sebesar 0,611, Cronbach alpha Sistem Pengendalian Internal (X3) sebesar 0,695, Cronbach alpha Partisipasi Masyarakat (X4) sebesar 0,664 dan Cronbach alpha Akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa sebesar 0,714. Sehingga seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai cronbach alpha diatas 0,60, maka dapat dikatakan seluruh konsep pengukur pada masing – masing variabel pada kuesioner layak dipakai untuk instrument penelitian serta dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Cronbach alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
X1	0,730	0,60	Reliabel
X2	0,611	0,60	Reliabel
X3	0,695	0,60	Reliabel
X4	0,664	0,60	Reliabel
Y	0,714	0,60	Reliabel

Sumber: data primer yang diolah, 2023.

**Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa hasil nilai asymp. Sig. (2-tailed) lebih diatas 0,05 atau sebesar 0,059 > 0,05 sehingga bisa dinyatakan data yang di uji pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80265833
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.048
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data primer yang diolah, 2023.

b. Uji Multikolonieritas

Berdasarkan tabel 4 diatas maka dapat diketahui berikut ini: (1.) Nilai VIF dari transparansi (X1) 2,048, nilai VIF Kompetensi (X2) 1,530, nilai VIF Sistem Pengendalian Internal (X3) 1,858 dan nilai VIF Partisipasi masyarakat (X4) 1,893 sehingga hasil nilai VIF setiap variabel Independen tidak lebih besar dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolonieritas. (2.) Nilai Tolerance dari transparansi (X1) 0,488 , nilai Tolerance Kompetensi (X2) 0,653 , nilai Tolerance Sistem Pengendalian Internal (X3) 0,538 dan nilai Tolerance Partisipasi masyarakat (X4) 0,528 sehingga hasil nilai Tolerance setiap variabel Independen lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak terjadi multikolonieritas. Hasil Uji Multikolonieritas dapat dilihat pada tabel 4.9 dibawah ini :

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

		Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,622	1,704		2,126	.035		
	X_1	.196	.088	.200	2,224	.028	.488	2,048
	X_2	.161	.084	.149	1,912	.058	.653	1,530
	X_3	.232	.087	.229	2,673	.008	.538	1,858
	X_4	.241	.095	.220	2,546	.012	.528	1,893

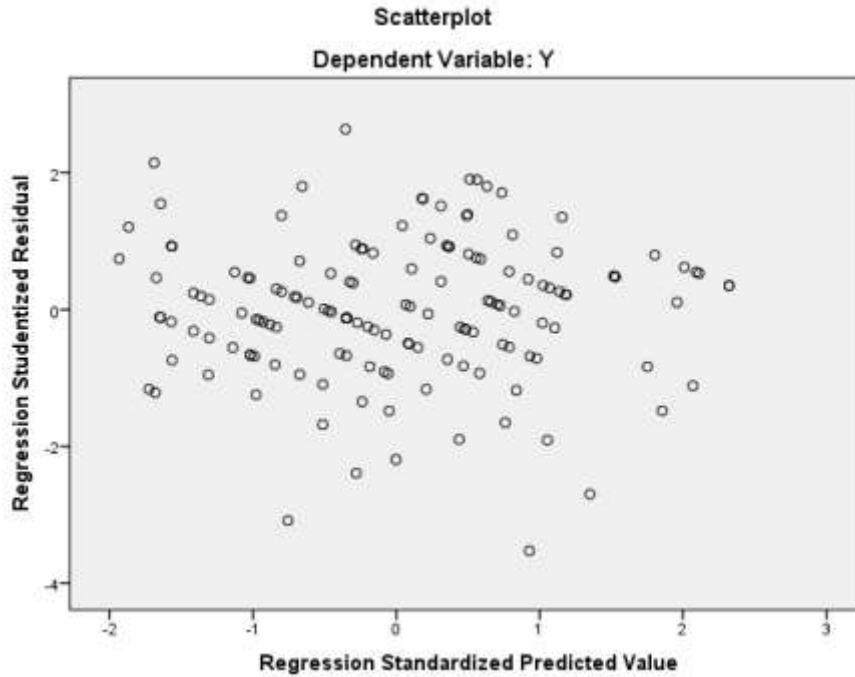
a. Dependent Variable: Y

Sumber: data primer yang diolah, 2023.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar scatterplot diatas menunjukkan tidak ditemukan pola tertentu, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, maka model regresi layak dipakai. Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :





Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas  
*Sumber: data primer yang diolah, 2023.*

**Pengujian Hipotesis**

- a. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini :

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.622	1.704		2.126	.035
	X_1	.196	.088	.200	2.224	.028
	X_2	.161	.084	.149	1.912	.058
	X_3	.232	.087	.229	2.673	.008
	X_4	.241	.095	.220	2.546	.012

a. Dependent Variable: Y

*Sumber: data primer yang diolah, 2023.*

Berdasarkan Tabel 6 diatas, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :  $Y = 3,622 + 0,196 X_1 + 0,161 X_2 + 0,232 X_3 + 0,241 X_4 + e$  . Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut ;

$\alpha$  = Konstanta menunjukkan angka 3,622 mempunyai makna bahwa nilai variabel independen transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal dan partisipasi masyarakat bernilai 0, maka variabel dependen yaitu Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa akan memiliki nilai sebesar 3,622 .

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel Transparansi sebesar 0,196 mempunyai makna bahwa nilai variabel Transparansi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel dependen yaitu Akuntailitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,196 atau 19,6%.

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel Kompetensi sebesar 0,161 mempunyai makna bahwa nilai variabel Kompetensi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel dependen yaitu Akuntabilitas pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,161 atau 16,1 %.

$\beta_3$  = Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,232 mempunyai makna bahwa nilai variabel Sistem Pengendalian Internal mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,232 atau 23,2 %.

$\beta_4$  = Koefisien regresi variabel Partisipasi Masyarakat sebesar 0,241 mempunyai makna bahwa nilai variabel Partisipasi Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dan variabel lain nilainya konstan, maka variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa akan mengalami kenaikan sebesar 0,241 atau 24,1 %.

b. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berikut adalah hasil uji signifikansi parameter individual (Uji Statistik t) dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.622	1.704		2.126	.035
	X_1	.196	.088	.200	2.224	.028
	X_2	.161	.084	.149	1.912	.058
	X_3	.232	.087	.229	2.673	.008
	X_4	.241	.095	.220	2.546	.012

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 7 diatas maka dapat diperoleh interpretasi sebagai berikut :

1. Variabel Transparansi (X1) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,028 < 0,05$  sementara t tabel dengan sig.  $\alpha = 0,025$  maka t tabel = t (0,025 ; n - k - 1) = t ((0,025) ; (150 - 5 - 1) = t (0,025 ; 144) = 1,977 itu berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,224 > 1,977$ ) maka dinyatakan hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Transparansi (X1) berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas pemerintah desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).
2. Variabel Kompetensi (X2) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,058 > 0,05$  sementara t tabel dengan sig.  $\alpha = 0,025$  maka t tabel = t (0,025 ; n - k - 1) = t ((0,025) ; (150 - 5 - 1) = t (0,025 ; 144) = 1,977 itu berarti nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ( $1,912 < 1,977$ ) maka dinyatakan hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi (X2) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas pemerintah desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).
3. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,008 < 0,05$  sementara t tabel dengan sig.  $\alpha = 0,025$  maka t tabel = t (0,025 ; n - k - 1) = t ((0,025) ; (150 - 5 - 1) = t (0,025 ; 144) = 1,977 itu berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,673 > 1,977$ ) maka dinyatakan hipotesis diiterima. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (X3) berpengaruh secara



parsial terhadap Akuntabilitas pemerintah desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

4. Variabel Partisipasi masyarakat (X4) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,012 < 0,05$  sementara t tabel dengan sig.  $\alpha = 0,025$  maka t tabel =  $t(0,025; n - k - 1) = t(0,025; (150 - 5 - 1)) = t(0,025; 144) = 1,977$  itu berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,546 > 1,977$ ) maka dinyatakan hipotesis diiterima. Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat (X4) berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas pemerintah desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y).

c. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan besarnya pengaruh variabel Transparansi (X1), kompetensi (X2), Sistem pengendalian Internal (X3) dan Partisipasi Masyarakat (X4) sebesar 0,411 atau 41,1% serta sisanya 58,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada studi pengamatan ini. Berikut hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini :

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji  $R^2$ )  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.653 <sup>a</sup>	.427	.411	1.82735

a. Predictors: (Constant), X\_4, X\_2, X\_3, X\_1

Sumber: data primer yang diolah, 2023

#### Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan bahwa signifikansi variabel Transparansi adalah sebesar 0,028. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil ini membuktikan H1 diterima. Dengan adanya kejelasan dan keterbukaan yang diberikan oleh aparatur desa kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan dana desa melalui media papan informasi maupun poster yang dipasang di balai desa sehingga sangat memudahkan masyarakat untuk mengetahuinya dengan jelas. Dengan demikian transparansi akan tercipta dengan sendirinya dan adanya timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat sebab masyarakat mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan pemerintah. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Mualifu (2019) dan Oktamia, dkk (2020) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah 76 desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dimana semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kompetensi adalah sebesar 0,058. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil ini membuktikan H1 ditolak. Dalam implementasi pengelolaan dana desa tidak hanya dibutuhkan kompetensi secara teknis saja. Akan tetapi pemahaman terhadap aturan dan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa menjadi hal krusial. Aparat desa harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam menentukan jenis kegiatan untuk alokasi dana desa yang sesuai dengan aturan. Sehingga dapat berkontribusi bagi pengembangan masyarakat dan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang baik. Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Ramadhan (2022) dan

Amanda Mutiara (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap pemerintah desa dalam pengalokasian dana desa, akan tetapi kompetensi hanya mengukur kemampuan dalam mengelola administrasi keuangan saja seperti menyusun, memberi nomor dan menyiapkan bukti – bukti transaksi.

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel sistem pengendalian internal adalah sebesar 0,008. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini membuktikan H1 diterima. Sistem Pengendalian Internal diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh signifikansi sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Unsur pengendalian internal yang baik yaitu kecakapan pegawai, keyakinan mencapai tujuan, prosedur dan peraturan. Penerapan sistem pengendalian internal yang benar dan baik dalam pemerintah desa mampu mencegah adanya penyelewangan terhadap dana desa serta pengelolaan dana desa pada pemerintah desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Puspa, 2020). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Nispa Sari, Dkk (2022) dan Dewi Indriasih, Dkk (2022) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel partisipasi masyarakat sebesar 0,012. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini membuktikan H4 diterima. Keterlibatan partisipasi masyarakat jika dihubungkan dengan teori *stewardship* dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan akan membantu pemerintah desa dalam rencana alokasi dana desa, karena masyarakatlah yang mengetahui berapa banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh karena itu partisipasi masyarakat diperlukan dalam penyusunan rencana alokasi dana desa. Hal ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020 ; Matia andriani, 2019 ; Aulia Rakhmadan Maryono, 2022 ; Desy Ramadhan K dan Tutik Diah Widajantie, 2022).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : (1.) Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. (2.) Kompetensi tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. (3.) Sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa (4.) Partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

### **Saran**

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas penelitian dengan menambahkan faktor – faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang belum dibahas dalam penelitian ini seperti variabel pemanfaatan teknologi informasi, kualitas penyajian laporan keuangan dan komitmen organisasi. Selain itu penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel ataupun desa yang berbeda.

**Referensi**

- Andriani, M. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa).
- Astuti, O., & Ratih, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Sinaka Kecamatan Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai).
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)*, 10(1).
- Budiana, D. A., Said, D., & Nursini. (2019). The Effect Of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management. *Scientific Research Journal*, Vii(I).
- Devi, S., & Bachri, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Pada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara.
- Hakiki, M. A., & Hidayat, S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi, Akuntabilitas Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.
- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes).
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi.
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022a). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(4).
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022b). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3(4).
- Khasanah, R. N. (2020). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa “ Studi Kasus Pada Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes .”
- Kumalasari, D. R., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Kebalandono. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1116.
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa Di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100.
- Mualifu, Guspul, A., & Hermawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di

- Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga). In *Journal Of Economic, Business And Engineering (Vol. 1, Issue 1)*.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(2), 92–107.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(2018).
- Peraturan Pemerintah (Pp) No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.(2008). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/4876>
- Peraturan Pemerintah (Pp) No.72 Tahun 2005 Tentang Desa.(2005).
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.(2014).
- Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.(2016).
- Periansya, & Ar, S. (2020). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin.
- Prayogi, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Balapulang Wetan).
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- Putri, A. R. L., & Maryono. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa.
- Risnawati, H., Wijayanti, S., & Retnoningsih, S. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 6(1), 199–211.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar).
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
- Sari, N., Dasila, R. A., & Sahrir. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa.
- Sari, N., Dasila, R. A., & Wahida, A. (2022). Pengaruh Transparansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut). In *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan Umkm (Vol. 2, Issue 1)*.
- Sweetenia, A. M., Caesari, E. P. A., Aprillia, A. F., & Purwantini, A. H. (2019). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 4(3), 1.
- Undang-Undang (Uu) No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.(2004).

- Undang-Undang (Uu) No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(2014).
- Undang-Undang (Uu) No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.(1999).
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar L. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sistem Informasi Akuntansi, Dan Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Empiris Desa-Desa Di Kabupaten Rokan Hulu.
- Walyati, F. N. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengeadlian Internal Terhadap Akuntabilits Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan).
- Yasir, M., & Sri Munawaroh, W. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. In *Management Studies And Entrepreneurship Journal* (Vol. 4, Issue 1).
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104.